

2007

ANALISIS ALTERNATIF KEBIJAKAN DALAM PENINGKATAN PRODUKSI PADI DI PROVINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

Budi Martono

ABSTRACT

Agriculture has been supporting economic development. Eventhough the effects of the 1997 drought in most parts of the country and tremendous dislocations caused by the crisis, the agriculture sector demonstrated tremendous resilience in coping with the economic crisis..

Based on the experienced, agriculture development policies could be done in order that agriculture sector to play a central role in the national economic recovery and repositioning agriculture as an engine of economic growth and empowering farmers to articulated their aspiration and interest effectively. The problems identification showed that the causes of rice production decreasing for Yogyakarta Special Province were: (1) Paddy field contraction; (2) Productivity decreasing; (3) Low in educational back ground of the farmers ; (4) Decreasing to motivation of young generation to work in agriculture and (5) Land ownership constriction.

To overcome these problems could be formulated four policy alternatives, were : (1) Policy alternative for productivity increasing; (2) Policy alternative for land constraction management ; (3) Policy alternative for increasing to motivation of young generation to work in agriculture and (4) Policy alternative for small scale farming intensification.

Based on analysis, the results of this case indicated that the best policy alternative to rice production increasing for Yogyakarta Special Province that should be recommended was Productivity Increasing Policy.

Key word: *Rice (paddy, Oryza Sativa), agriculture, policy analysis, policy alternative*

PENDAHULUAN

Saat ini sektor pertanian masih mempunyai arti yang strategis. Keberhasilan pembangunan di sektor pertanian pada saat ini akan sangat menentukan sukses tidaknya pembangunan pertanian sekaligus kesinambungan pembangunan pertanian di masa mendatang. Apalagi krisis

moneter yang terjadi pada akhir tahun 1997, telah membuktikan bahwa sektor pertanian adalah sektor yang masih tangguh.

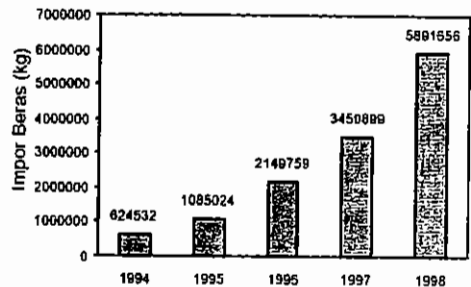
Selama Orde Baru, sektor pertanian dalam batas-batas tertentu telah mampu memainkan empat peran klasik pertanian, yaitu: (1) penyedia pangan; (2) penyedia bahan baku untuk industri; (3) penghasil devisa;

dan (4) pasar bagi sektor ekonomi lainnya. Melihat kondisi pertanian sekarang ini, tanpa mengecilkkan arti hasil yang telah dicapai tersebut, masih banyak yang harus dilakukan, untuk membuat sektor ini sungguh-sungguh dapat menjadi tulang-punggung perekonomian nasional.

Produktivitas pertanian rakyat untuk hampir semua komoditas masih sangat jauh dari tingkat produktivitas potensial yang dapat dicapai. Produktivitas padi di lahan irigasi misalnya, dengan teknologi pengembangannya paling maju dibandingkan dengan teknologi produksi komoditas lainnya, baru mencapai rata-rata produksi sekitar 4,5 ton Gabah Kering Giling (GKG) per hektar, masih di bawah produktivitas potensial yang diperkirakan sebesar 7 ton per hektar.

Pada tingkat nasional, berdasarkan angka Badan Pusat Statistik, produksi padi tahun 1999 mencapai 49.875 ribu ton GKG. Sedangkan berdasarkan data Direktorat Jenderal Tanaman Pangan dan Hortikultura yang tersaji dalam Laporan Akhir Tahun 1999, menyatakan bahwa impor beras dari tahun ke tahun selalu meningkat. Tahun 1994, 1995, 1996, 1997 dan 1998 berturut-turut sebesar (dalam kg) adalah 624.532,312; 1.085.024,722; 2.149.759,132; 3.450.899,14; 5.891.656,072 atau rata-rata 215,53 % per tahunnya. Data tersebut akan lebih jelas kecenderungannya bila dilihat pada grafik 1 berikut¹:

Grafik 1. Trend Kecenderungan Impor Beras Nasional Tahun 1994 - 1998 (dalam kilogram)



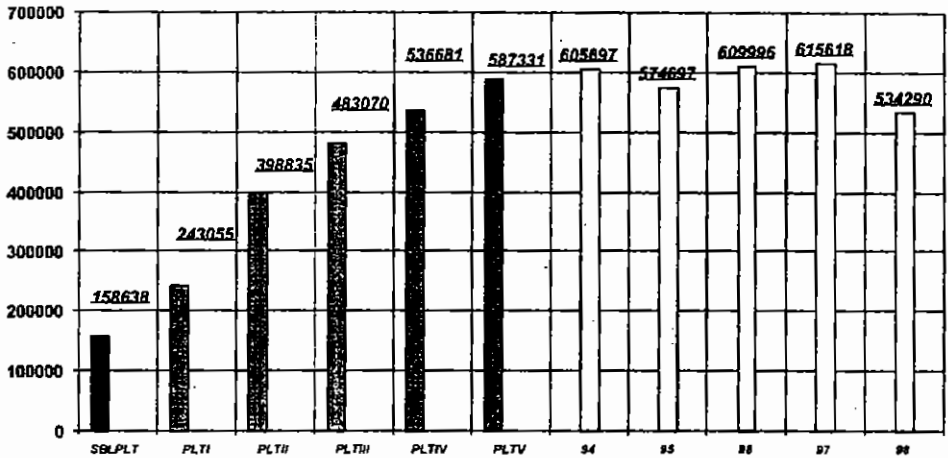
Sumber Data: Direktorat Jenderal Tanaman Pangan dan Hortikultura, 1999

Dari angka dan kecenderungan (*trend*), terlihat jelas bahwa sejak tahun 1994 sampai dengan tahun 1998, Indonesia masih melakukan impor beras, dengan kenaikan yang cukup tinggi per tahunnya. Diperkirakan dengan laju pertumbuhan penduduk sebesar 1,7 % per tahun, maka penduduk Indonesia pada tahun 2025 diramalkan sebanyak 275 juta jiwa. Ini berarti harus tersedia pangan tidak kurang dari 64-65 juta ton GKG. Padahal di tingkat daerah, kemampuan daerah untuk menghasilkan pangan tidak sama, sangat bervariasi, dan tergantung pada potensi wilayah (agroekologi dan agroklimat). Namun sebagai dampak dari kemajuan teknologi, sejak sebelum PELITA sampai dengan PELITA V telah terjadi peningkatan produksi padi yang cukup berarti khususnya di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.

Setelah itu, sejak awal PELITA VI, peningkatan produksi padi per hektarnya tidak mencapai tingkat yang diharapkan dan ada kecenderungan untuk menunjukkan gejala pelandaian (*leveling off*). Data tentang pertumbuhan produksi padi sawah sejak sebelum Pelita sampai dengan Pelita VI di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, dapat dilihat pada grafik 2.

1. Lihat, Bambang Guritno, Manajemen Produksi Tanaman Pangan dan hortikultura menuju ketahanan Pangan Dan Agribisnis tangguh, dalam Makalah Diskusi Pakar Arah Pembangunan Tanaman Pangan dan Hortikultura (Yogyakarta, 1999)

**Grafik 2. Produksi Padi Sawah (dalam ton)
Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta**



Sumber Data: Laporan Tahunan Dinas Pertanian Tanaman Pangan Provinsi DIY.1999

Dari grafik tersebut terlihat jelas bahwa sejak sebelum PELITA I sampai dengan PELITA V, terjadi peningkatan produksi padi sawah dari 158.638 ton menjadi 587.331 ton atau peningkatan rata-rata sebesar 71.448,8 ton per tahun. Namun setelah itu mulai nampak gejala penurunan produksi di tahun 1995. Produksi padi sawah tahun 1995 mengalami penurunan produksi sebesar 31.000 ton atau 5,12 % bila dibandingkan dengan tahun 1994. Begitu pula untuk produksi padi sawah tahun 1998 juga mengalami penurunan produksi sebesar 81.320 ton atau 13,21 % bila dibandingkan dengan tahun 1997.

Bila dilihat dari kecenderungan *trend* grafik pertumbuhan padi sawah di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta yang cenderung menurun sejak awal PELITA VI, maka pemerintah harus segera melakukan intervensi dalam bentuk kebijakan publik untuk segera melakukan upaya peningkatan produksi padi sawah di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.

Mengingat kompleksnya permasalahan yang akan dihadapi di masa mendatang sebagai dampak globalisasi, maka diperlukan adanya keterpaduan, ketergantungan dan keterkaitan antar sektor yang diwujudkan dalam perencanaan kebijakan publik, implementasi dan pemantauannya. Untuk itulah perlu dicari akar permasalahannya serta alternatif kebijakan yang bersifat lokal spesifik di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.

PERMASALAHAN

Jumlah penduduk Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta yang cukup besar (3.237.628 jiwa pada tahun 1998) dan terus tumbuh sekitar 0,76 persen per tahun dengan konsumsi pangan pokok terkonsentrasi pada beras yang cukup besar (86,92 kg/kapita/tahun). Hal ini menyebabkan kebutuhan beras menjadi sangat besar. Permintaan beras tersebut mengakibatkan beras tidak saja

merupakan komoditas ekonomi tetapi juga menjadi komoditas sosial dan politik. Sehubungan dengan hal tersebut, peningkatan produksi padi di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta merupakan hal yang sangat penting.

Permasalahan utama yang dihadapi dalam penyediaan beras sebagai makanan pokok adalah terkait dengan upaya peningkatan produksi padi dalam jumlah yang besar dan terus meningkat dengan terbatasnya sumberdaya yang tersedia. Di lain pihak, upaya peningkatan produksi padi juga harus diimbangi dengan peningkatan pendapatan dan kesejahteraan petani.

Upaya peningkatan produksi padi di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, tampaknya dihadapkan pada berbagai permasalahan. Berdasarkan hasil pengamatan pendahuluan, terlihat adanya *problematic situation*, antara lain :

a. Penyusutan Lahan Pertanian

Penyusutan lahan pertanian atau alih fungsi lahan dari yang semula diperuntukkan bagi usaha pertanian menjadi non pertanian, serta dari komoditas padi ke non padi semakin pesat. Dari tahun 1989 sampai dengan tahun 1997, perkembangan lahan sawah di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta mengalami penyusutan atau perubahan fungsi lahan. Disamping itu pada tahun yang sama terjadi penurunan luas lahan sawah seluas 2.111 hektar atau 263,88 hektar per tahun. Gejala ini justru terjadi pada tempat-tempat dengan kondisi "pedo-agroklimat" yang kondusif bagi usaha tani yang produktif. Keadaan ini memperlemah

kemampuan petani dalam meningkatkan produksi padi.

b. Sempitnya Pemilikan Lahan

Pertanian di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta masih tetap dicirikan oleh usaha skala kecil (luasan sempit). Dengan lahan usaha yang kecil (lebih kecil dari 0,5 hektar), berapapun tingkat produktivitas yang dicapai, tidak akan dapat memberikan tingkat pendapatan yang layak. Pada umumnya lahan usaha yang kecil tersebut dikelola oleh sumberdaya dengan kualitas dan tingkat pendidikan relatif rendah. Sehingga usaha tani dengan skala kecil tersebut harus segera dicarikan jalan penyelesaiannya untuk meningkatkan efisiensi usaha.

Dari data Sensus Pertanian (SP) 1993 dan 1996, menunjukkan bahwa jumlah pemilik tanah sempit (<0,5 ha) di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta semakin besar, dari 267.246 orang di tahun 1993 menjadi 304.830 orang di tahun 1996 atau meningkat sebesar 37.584 orang (14,06 persen). Sedangkan pemilik lahan yang luas (>0,5 ha) di tahun 1993 sebanyak 161.858 orang, menurun menjadi 127.957 orang atau telah terjadi penurunan sebesar 33.901 orang atau 20,94 persen.

c. Rendahnya Tingkat Pendidikan Petani dan Berkurangnya Minat Tenaga Muda Bekerja di Sektor Pertanian

Apabila dilihat dari segi kualitas sumberdaya manusia, khususnya dalam hal pendidikan formal, sebagian terbesar petani tidak menyelesaikan pendidikan dasar, bahkan sedikit yang tidak pernah mengecap pendidikan

formal sama sekali. Begitu pula, jarang dijumpai tenaga muda produktif yang bekerja di sektor pertanian. Sebagian besar dari mereka lebih senang bekerja di kota yang dirasakan lebih menjanjikan bila dibandingkan dengan bekerja di sektor pertanian

Pada umumnya tingkat pendidikan petani masih rendah, yaitu mulai dari tidak tamat sekolah dasar sampai hanya lulus sekolah dasar. Sebagian besar petani berpendidikan sekolah dasar (49,45 persen), berpendidikan SLTP sebesar 18,63 persen, dan berpendidikan setingkat SLTA sebesar 10,23 persen.

Di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, berdasarkan hasil penelitian tentang usia produktif yang bekerja di sektor pertanian, diperoleh gambaran sebagai berikut. Rata-rata sebesar 28,12 persen angkatan kerja pertanian di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta sudah berusia antara 51-60 tahun dan 27,75 persen angkatan kerja

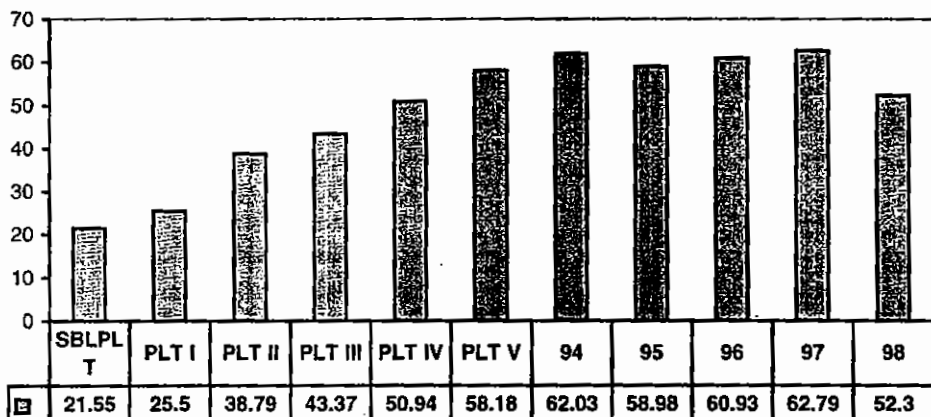
pertanian yang berusia antara 41-50 tahun dan 13,67 persen berusia 61-70 tahun.

d. Rendahnya Tingkat Produktivitas dan Penanganan Paska Panen

Produktivitas padi per hektar di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, hampir di seluruh kecamatan masih jauh dari tingkat produktivitas potensial yang seharusnya dapat dicapai. Sehingga peningkatan produktivitas masih dapat dilakukan melalui peningkatan pemanfaatan teknologi, khususnya di bidang pertanian yang spesifik lokasi.

Produktivitas padi sawah di Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta dari tahun ke tahun mengalami fluktuasi. Memang sejak sebelum PELITA sampai dengan PELITA V ada kecenderungan meningkat, namun *trend* peningkatan tersebut cenderung menurun.

Grafik 3. Produktivitas Padi Sawah (ku/ha) Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Sebelum Pelita I s/d Tahun 1998



Sumber : Analisis pengolahan data primer

Kehilangan hasil dan kerusakan paska panen hasil-hasil pertanian, khususnya padi juga masih cukup tinggi, yaitu sekitar 15 persen. Kehilangan hasil ini diharapkan dapat ditekan melalui perbaikan teknologi pengendalian organisme pengganggu tanaman, teknologi panen dan paska panen. Penyebab utama sulitnya meningkatkan penanganan paska panen adalah adanya keterbatasan ruang gerak sektor pertanian, yaitu hanya pada aspek produksi atau budidaya pertanian saja. Sementara itu, permasalahan yang muncul justru sebagian besar berada di luar aspek produksi, seperti pengadaan prasarana, jalur distribusi dan pemasaran hasil. Demikian pula, penciptaan nilai tambah dan kebijakan insentif yang dapat dijadikan sumber utama peningkatan pendapatan petani sebagian besar berada di luar subsistem produksi (*off-farm*).

Berdasarkan pemikiran tersebut maka pertanyaan mendasar dalam upaya peningkatan produksi padi di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta adalah : alternatif-alternatif kebijakan apa yang harus dibuat agar produksi padi meningkat sekaligus meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan petani.

LANDASAN TEORI

Analisis kebijakan adalah aktivitas menciptakan pengetahuan tentang dan dalam proses pembuatan kebijakan (Laswell dalam Dunn, 1999). Dalam menciptakan pengetahuan tentang proses pembuatan kebijakan, analisis kebijakan meneliti sebab,

akibat dan kinerja kebijakan dan program publik.²

Seringkali kebijakan publik belum dilaksanakan secara sistematis dan cenderung reaktif, sehingga kualitas kebijakan sangat rendah dan banyak ditentang masyarakat. Selain itu berbagai kebijakan masih mengandung sejumlah kelemahan, antara lain: (1) inti permasalahan tidak dikenali dengan baik; (2) mengalami kegagalan karena ditentang oleh masyarakat; (3) *outcomes* kebijakan tidak seperti yang diharapkan.

Suatu sistem kebijakan (*policy system*) atau seluruh pola institusional di mana di dalamnya kebijakan dibuat, mencakup hubungan timbal balik antara tiga unsur, yaitu : kebijakan publik, pelaku kebijakan dan lingkungan kebijakan. Ketiga elemen tersebut dalam pelaksanaannya saling mempengaruhi satu sama lain. Pelaku kebijakan (*stake holders*), misalnya analis kebijakan, kelompok warga negara, perserikatan buruh, partai politik, agen-agen pemerintah, pemimpin terpilih, sering menangkap secara berbeda informasi yang sama mengenai lingkungan kebijakan. Lingkungan kebijakan (*policy environment*) yaitu konteks khusus dimana kejadian-kejadian di sekeliling isu kebijakan terjadi, mempengaruhi dan dipengaruhi oleh pembuat kebijakan dan kebijakan publik. Oleh karena itu, *system* kebijakan berisi proses yang bersifat dialektis, yang berarti bahwa dimensi obyektif dan subyektif pembuatan kebijakan tidak terpisahkan didalam prakteknya.

² Lihat W.N. Dunn, *Pengantar Analisis Kebijakan Publik*, (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 1999)

System kebijakan adalah produk manusia yang subyektif yang diciptakan melalui pilihan-pilihan yang sadar oleh para pelaku kebijakan. System kebijakan menurut Dunn (Dunn, 1999) adalah realitas obyektif yang dimanifestasikan kedalam tindakan-tindakan yang teramati berikut konsekuensi-konsekuensinya.³

Metode yang dipakai untuk mengevaluasi suatu alternatif kebijakan menurut Effendi (Effendi, 1990)⁴, setidaknya ada 7 metode yang bisa digunakan, yaitu :

- a) *Franklin Method*, adalah suatu metode untuk memilih dan membandingkan berbagai alternatif dengan cara menginventarisir berbagai alasan positif dan negatif ataupun dengan melihat konsekuensi masing-masing kebijakan yang telah diidentifikasi.
- b) *Paurel Compretion Method*, adalah suatu cara memilih dan membandingkan berbagai alternatif kebijakan secara berpapasan sampai memperoleh alternatif terakhir.
- c) *Satisfizing method*, adalah cara memilih alternatif kebijakan dengan mendasarkan apakah alternatif tersebut memenuhi kriteria yang telah ditetapkan.
- d) *Lexicographic Method*, adalah suatu cara pemilihan alternatif kebijakan dengan membandingkan semua alternatif berdasarkan kriteria seleksi.
- e) *Alternatif Non Domain Method*, adalah suatu cara membandingkan alternatif kebijakan, dimana yang paling dominan adalah yang dipilih.

f) *Equivalent Alternatif Method*, adalah suatu cara memilih alternatif dengan membandingkan alternatif dengan membuat standart atau kriteria yang sama yang akan digunakan.

g) *Analisis Matrix Method*, adalah suatu cara memebandingkan alternatif kebijakan dengan menggunakan matrix.

Dengan menerapkan kriteria-kriteria tersebut seorang analis dapat merekomendasikan alternatif kebijakan mana yang paling baik dalam kaitannya dengan pencapaian tujuan. Lebih jauh Dunn (Dunn, 1999) mengemukakan bahwa untuk mengadopsi alternatif-alternatif kebijakan dengan memperhatikan syarat-syarat, isi, pelaku dan proses kebijakan digunakan analisis "Rekomendasi" yang pada akhirnya menghasilkan "Tindakan Kebijakan" (*Policy Action*).⁵

DESKRIPSI ALTERNATIF KEBIJAKAN DALAM PENINGKATAN PRODUKSI PADI DI PROVINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

Dari uraian yang telah dijelaskan di muka, diketahui bahwa yang menjadi akar permasalahan (*roots of the problem*) adalah masalah penurunan produksi padi di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, yang secara langsung akan mempengaruhi tingkat pendapatan dan kesejahteraan petani. Seperti telah dijelaskan sebelumnya bahwa penyebab masalah (*causes of the problem*) penurunan produksi padi, telah teridentifikasi

³ *Ibid*

⁴ Lihat, Sofyan Effendi, *Hand Out Analisis dan Implementation Kebijakan Publik*, (Yogyakarta, MAP-UGM:2000)

⁵ *Ibid*

sebagai berikut : (1) Penurunan tingkat produktivitas dan penanganan paska panen padi; (2) Penyusutan lahan sawah; (3) Rendahnya minat kerja tenaga muda di sektor pertanian dan (4) Pemilikan lahan sawah yang sempit.

Dengan demikian dapat diramalkan tentang masa depan kebijakan (Kebijakan Alternatif). Melalui peramalan, dapat diperoleh visi yang prospektif, atau tinjauan ke depan, sehingga melebarkan kapasitas dalam memahami, mengontrol dan membimbing masyarakat. Peramalan (*forcasting*) adalah suatu prosedur untuk membuat informasi faktual tentang situasi sosial masa depan atas dasar informasi yang telah ada tentang masalah kebijakan (Dunn, 1999).⁶

Metode yang digunakan dalam peramalan untuk menentukan alternatif kebijakan dalam Analisis Kebijakan Peningkatan Produksi Padi di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta adalah *Projection Forecasting*, yaitu ramalan yang didasarkan pada ekstrapolasi atas kecenderungan masa lalu maupun masa kini ke masa depan. Proyeksi membuat pernyataan yang tegas berdasarkan argumen yang diperoleh dari metode tertentu dan kasus yang paralel, asumsi mengenai validitas metode tertentu (analisis antar waktu) atau kemiripan kasus (kebijakan masa lalu dan masa depan).

Dari hasil perumusan masalah kebijakan, untuk meningkatkan produksi padi di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta dengan menggunakan metode *projection forecasting* dapat dibuat 4 (empat) alternatif kebijakan, yaitu :

1. Alternatif Kebijakan Peningkatan Produktivitas dan Penanganan Paska Panen Tahun 2001 - 2010

a. Tujuan Umum Kebijakan

Tujuan umum alternatif kebijakan ini adalah meningkatkan produktivitas dan produksi padi di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Kebijakan Status Quo masih menunjukkan bahwa tingkat produksi padi masih berkisar di antara 4,4 ton per hektarnya. Berdasarkan data yang dihimpun, sejak awal PELITA VI terjadi gejala pelandaian atau penurunan produksi dan produktivitas padi (*leveling off*). Diharapkan dengan adanya alternatif kebijakan ini, produksi padi dapat ditingkatkan menjadi 6 ton per hektarnya pada tahun 2001 dan meningkat lagi menjadi 8 ton per hektar di tahun 2010. Sedangkan produktivitas yang pada saat ini masih rendah, dapat ditingkatkan sebesar 1,5 kuintal perhektar di tahun 2001 dan meningkat lagi 2,5 kuintal per hektar di tahun 2010. Hal ini diharapkan dapat dicapai bila diasumsikan bahwa keadaan iklim mendukung dan tidak terjadi serangan dari organisme pengganggu tanaman. Hal tersebut dimungkinkan, karena berdasarkan hasil penelitian yang dilaksanakan oleh Pusat Penelitian dan Pengembangan Tanaman Pangan- Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian Departemen Pertanian, telah tersedia varietas padi unggul yang memiliki kemampuan produksi sampai dengan 8 (delapan) ton per hektarnya. Di samping mempunyai tingkat produksi tinggi, varietas padi tersebut juga mempunyai karakteristik rasa nasi yang enak dan tahan terhadap hama dan penyakit tertentu.

⁶ *Ibid*

Tabel 1. Varietas-varietas Padi Unggul Yang Dilepas

Varietas	Kisaran Hasil (ton/ha)	Umur (Hari)	Rasa Nasi
a. Dodokan	4-7	105	Enak
b. Jangkok	4-7	100	Enak
c. Ciliwung	5-8	121	Enak
d. Walanai	5-8	125	Sedang
e. Lusi	5-8	135	Ketan
f. Way Seputih	5-8	125	Enak
g. IR 66	5-8	115	Sedang
h. IR 70	5-8	130	Kurang
i. IR 72	5-8	120	Kurang
j. IR 74	5-7	115	Enak
k. Cenranae	5-8	115	Kurang
l. Lariang	5-8	115	Sedang
m. Barumun	5-8	130	Enak
n. Atomita 4	5-8	120	Enak

Sumber : Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian Dep.Tan 1992

b. Fokus Kebijakan

Hasil yang diharapkan dari kebijakan alternatif ini adalah :

a) Pemanfaatan teknologi terapan oleh petani.

Pada saat ini masih sedikit petani yang menggunakan teknologi untuk mengelola usahatani. Dengan kebijakan alternatif ini, diharapkan pada tahun 2001 sebanyak 40 % dari petani sudah menggunakan teknologi terapan dan 70 % dari jumlah petani sudah menggunakan teknologi terapan di tahun 2010. Upaya-upaya yang dilakukan pada pemanfaatan teknologi terapan ini adalah melalui peningkatan mutu intensifikasi di bidang: penggunaan benih unggul dan berlabel, pemupukan berimbang, budidaya tanaman dan mekanisasi pertanian.

b) Efisiensi penggunaan pupuk kimiawi (An-Organik)

Selama ini masih terjadi penggunaan pupuk kimiawi yang berlebihan. Diharapkan pada tahun 2001 terjadi penghematan pupuk kimiawi sebesar 25% dan penghematan sebesar 50% di tahun 2010. Kegiatan efisiensi penggunaan pupuk an-organik dapat dilaksanakan dengan gerakan penggunaan pupuk organik. Hal ini dimungkinkan karena penggunaan pupuk an-organik telah terbukti merusak struktur tanah. Pernyataan ini didukung oleh pendapat seorang pengurus KTNA pada saat dilakukan wawancara, dan pernyataan tersebut adalah :

“.....untuk meningkatkan produksi, petani telah banyak menggunakan

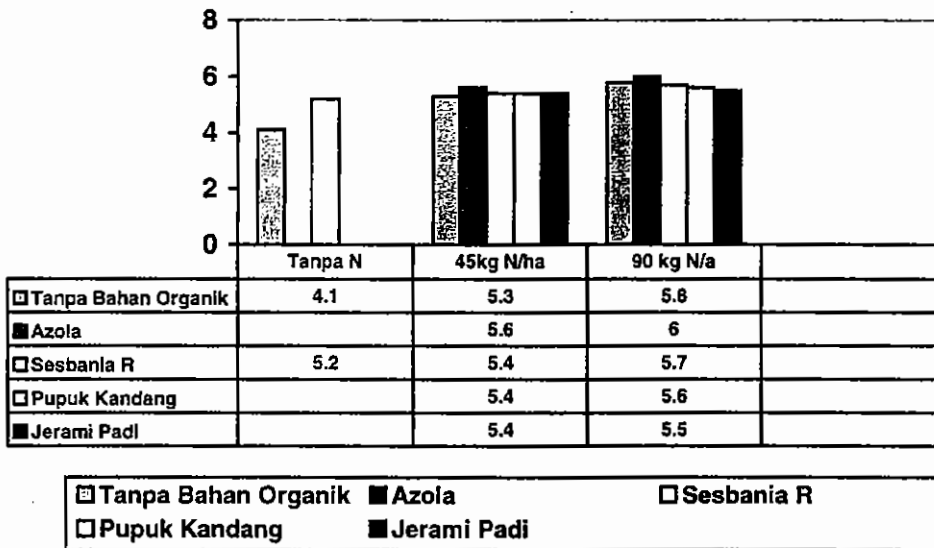
teknologi-teknologi terbaru. Namun ternyata produksinya dan pendapatan petani belum dapat meningkat, karena harus mengeluarkan biaya yang tinggi. Di samping itu tanah pertanian semakin rusak karena petani selalu menggunakan pupuk anorganik (pupuk kimia) terlalu banyak, tidak berdasarkan tingkat kebutuhan tanaman dengan hara yang tersedia di dalam tanah “

(Yitno Dihadjo, KTNA-
Kecamatan Lendah-Kulon
Progo)

Penggunaan pupuk organik ini perlu mendapat perhatian karena sangat berguna untuk memperbaiki struktur tanah, sumber hara mikro, media untuk perkembangan mikroba tanah, meningkatkan kemampuan tanah untuk mengikat air. Karena itu pupuk organik secara keseluruhan akan mendukung peningkatan produksi padi secara berkelanjutan.

Berbagai pupuk organik, misal azolla (*Azolla sp.*), sesbania (*Sesbania rostrata*), jerami dan pupuk kandang telah diteliti dan pada umumnya menunjukkan pengaruh positif terhadap peningkatan hasil.

Grafik 4. Pengaruh Pemberian Berbagai Bahan Organik Terhadap Hasil Padi Sawah (ton/ha)



Sumber : Analisis pengolahan data dari berbagai hasil penelitian

c) Penghematan penggunaan pestisida kimiawi

Harapannya, akan terjadi penghematan pestisida sebesar 50 %-80 % pada tahun 2010. Hal ini ditekankan karena secara agronomis, perlu tidaknya penggunaan pestisida masih dipertanyakan. Studi yang telah dilakukan tentang hubungan antara penyemprotan pestisida dengan keracunan akut pada petani Indonesia menyatakan bahwa 21 persen kegiatan penyemprotan mengakibatkan timbulnya tiga atau lebih gejala dan tanda keracunan pada saraf, saluran pernapasan dan pencernaan. Resiko terhadap kesehatan akibat pestisida tidak hanya dijumpai selama penggunaan di lahan, melainkan juga ditemukan di rumah, tempat para petani penyemprot tinggal. Delapan puluh empat persen (84%) petani yang diteliti, ternyata menyimpan bahan kimia beracun tersebut di dalam rumah dalam keadaan tidak aman dan mudah dijangkau oleh anak-anak. Hal tersebut didukung pernyataan petani saat dilakukan diskusi kelompok di Kalisentul, Banjarharjo, Kalibawang, Kulon Progo:

".. saat ini banyak bermunculan produk-produk pestisida kima, baik berupa cairan maupun serbuk yang apabila tidak diatur penggunaannya maka dalam jangka waktu lama akan sangat berbahaya bagi kesehatan manusia."

(Minto Subekti, Petani,
Banjarharjo-Kalibawang-
Kulon Progo)

Dalam rangka menggali dan memanfaatkan sumberdaya alam yang ada disekitar kita serta dalam rangka menjaga kelestarian lingkungan maka pemakaian pestisida alami (nabati dan hayati) dirasa menjadi hal yang penting.

d) Penyuluhan secara partisipatoris

Petani lebih diberdayakan, sehingga kebijakan alternatif ini akan memperbesar keterlibatan petani dalam proses penyuluhan (70%-90% petani). Tujuan dari kegiatan ini adalah meningkatnya kemandirian petani dalam mengelola masalah lokal secara partisipatoris dan sistematis. Indikator tercapainya tujuan-tujuan ini adalah berubahnya sikap ketergantungan petani terhadap petugas dan pejabat pemerintah dalam memecahkan masalah pertanian yang dihadapi. Mereka menjadi memiliki sikap percaya terhadap diri sendiri dan meningkatnya sikap dan tindakan kerjasama di antara petani, terlaksananya kegiatan-kegiatan yang direncanakan dan dilaksanakan oleh kelompok tani sendiri, terpecahkannya masalah-masalah lokal secara memuaskan; berkembangnya inisiatif petani menggunakan pengalamannya untuk pemecahan masalah lokal; semakin kuatnya organisasi kelompok tani di tingkat desa dan berkembangnya jaringan organisasi petani antar desa.

e) Peningkatan Mutu Intensifikasi

Dari hasil penelitian yang dilakukan di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, masih banyak daerah kecamatan yang rata-rata produktivitasnya di bawah rata-rata kabupaten. Kegiatan ini ditujukan untuk melakukan intensifikasi di

daerah tersebut dan diharapkan pada tahun 2010 daerah tersebut sudah dapat ditingkatkan produktivitasnya.

Untuk lebih memperjelas Alternatif Kebijakan Peningkatan Produktivitas Hasil 2001-2010 ini, dapat dilihat pada deskripsi tabel 2.

Tabel 2. Deskripsi Alternatif Kebijakan Peningkatan Produktivitas dan Paska Panen

URAIAN	STATUS QUO	SASARAN ALTERNATIF KEBIJAKAN PENINGKATAN PRODUKTIVITAS		ASUMSI
		TH. 2001	TH. 2010	
TUJUAN UMUM				
1. <i>Produksi Padi Meningkat</i>	Produksi Padi : 4,5 ton per hektar	Produksi Padi : 6 ton per hektar	Produksi Padi : 8 Ton per hektar	♦ Iklim mendukung ♦ Tidak ada serangan Organisme Pengganggu Tanaman
2. <i>Produktivitas Padi Meningkat</i>	Produktivitas Padi Menurun	Produktivitas Padi Meningkat 1.5 kuintal per hektar	Produktivitas Padi Meningkat 2.5 kuintal per hektar	
FOKUS KEBIJAKAN				
1. <i>Penerapan Teknologi Di Tingkat Petani</i>	Masih sedikit petani menggunakan teknologi terapan	40 % petani menggunakan teknologi terapan	70 % petani menggunakan teknologi terapan	♦ Stabilitas Situasi Sosial, Ekonomi dan Politik
2. <i>Efisiensi penggunaan pupuk kimiawi</i>	Penggunaan pupuk kimiawi yang berlebihan	25 % pupuk kimia dihemat	50 % pupuk kimia dihemat	♦ Gerakan penggunaan pupuk organik
3. <i>Pengurangan penggunaan pestisida kimiawi</i>	Penggunaan pestisida kimiawi yang berlebihan	50 % pestisida kimia dihemat	80 % pestisida kimia dihemat	♦ Dimanfaatkannya pestisida hayati dan nabati
4. <i>Dilakukan penyuluhan partisipatoris</i>	Belum seluruhnya mengikuti penyuluhan Masih banyak kecamatan yang produktivitas dan paska panen nya rendah	70 % petani mengikuti penyuluhan 30 % kecamatan yang produktivitas dan paska panen nya rendah, dapat ditingkatkan	90 % petani mengikuti penyuluhan 60 % kecamatan yang produktivitas dan paska panen nya rendah, dapat ditingkatkan	♦ Sikap pemerintah sebagai fasilitator dan motivator, dibidang insentif
5. <i>Peningkatan mutu intensifikasi dan paska panen</i>				

Sumber : Analisis pengolahan data primer

2. Alternatif Kebijakan Pengendalian Penyusutan Lahan Tahun 2001 - 2010

a. Tujuan Umum Kebijakan

Tujuan umum yang ingin dicapai Alternatif Kebijakan Pengendalian Penyusutan Lahan 2001-2010 ini adalah penyusutan lahan sawah dapat dikendalikan. Seperti telah dikemukakan bahwa pada saat ini telah terjadi penyusutan lahan di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta yang cukup besar yaitu 263,3 hektar pertahunnya dan belum ada Undang-Undang yang jelas yang membatasi peruntukan lahan.

b. Fokus Kebijakan

Penyusutan lahan pertanian, tampaknya sudah menjadi resiko pembangunan dan akan tetap berlangsung. Dengan demikian pemecahannya adalah mengendalikan laju penyusutan lahan sehingga kecil kemungkinan untuk mencetak lahan pertanian baru.

Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta mengisyaratkan bahwa di

Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta sudah tidak mungkin untuk mencetak lahan pertanian baru. Sebab, di samping membutuhkan anggaran yang sangat besar, areal untuk dijadikan lahan pertanian juga sudah tidak ada. Selanjutnya Gubernur menyatakan :

“...upaya yang masih mungkin dilakukan adalah mengoptimalkan lahan yang masih tersisa serta peningkatan sumber daya manusia di bidang pertanian ..”

(Sri Sultan Hamengku Buwono X, Ratek Bimas DIY, 2000)

Diharapkan dengan adanya Alternatif Kebijakan Pengendalian Penyusutan Lahan 2001 - 2010, penyusutan lahan akan dapat dikendalikan. Pada tahun 2001 diharapkan penyusutan lahan sawah dapat ditekan menjadi 150 hektar per tahunnya dan tahun 2010 dapat ditekan menjadi 100 hektar per tahunnya.

Berikut deskripsi Alternatif Kebijakan Pengendalian Penyusutan Lahan 2001-2010.

Tabel 3. Deskripsi Alternatif Kebijakan Pengendalian Penyusutan Lahan

URAIAN	STATUS QUO	SASARAN ALTERNATIF KEBIJAKAN INTENSIFIKASI LAHAN SEMPIT		ASUMSI
		TH. 2001	TH. 2010	
TUJUAN UMUM Penyusutan lahan sawah dapat dikendalikan	Penyusutan Lahan cukup besar yaitu 263,88 hektar per tahun	Penyusutan lahan sawah dapat ditekan menjadi 150 hektar per tahun	Penyusutan lahan sawah dapat ditekan menjadi 100 hektar per tahun	<ul style="list-style-type: none"> ◆ Regulasi ditegakkan ◆ Peningkatan SDM Pertanian
FOKUS KEBIJAKAN <i>Tersusnya Zoning/ Tata Guna Lahan</i>	Belum ada	Disusun Undang-Undang Tata Guna Lahan dan disosialisasikan	Penegakan aturan Undang-Undang Tata Guna Lahan dan sangsi	<ul style="list-style-type: none"> ◆ Koordinasi lintas sektoral

Sumber : Analisis pengolahan data primer

3. *Alternatif Kebijakan Peningkatan Minat Tenaga Muda Bekerja Di Sektor Pertanian Tahun 2001 - 2010*

a. Tujuan Umum

Tujuan yang hendak dicapai alternatif kebijakan ini adalah meningkatkan minat tenaga kerja muda produktif untuk bekerja di sektor pertanian. Berdasarkan kenyataan saat ini banyak tenaga muda produktif yang lebih senang bekerja di luar sektor pertanian. Diharapkan alternatif kebijakan ini nantinya akan dapat menarik minat tenaga kerja muda produktif untuk bekerja di sektor pertanian. Pada tahun 2001 diharapkan sebesar 30% dari jumlah tenaga kerja muda produktif berminat bekerja di sektor pertanian dan pada tahun 2010 akan meningkat menjadi 50%.

b. Fokus Kebijakan

Untuk mendukung hal tersebut, harus dilakukan pelatihan atau magang baik di dalam maupun di luar negeri dalam hal pengelolaan usahatani secara modern yang berwawasan agribisnis. Kebijakan ini mentargetkan terciptanya 10% tenaga muda yang sudah terdidik di tahun 2001 dan 30% di tahun 2010.

Agar bekerja di sektor pertanian lebih menjanjikan, maka harga komoditi padi harus diproteksi, sehingga kebijakan harga yang ditetapkan nantinya akan lebih menguntungkan petani. Kebijakan stabilisasi harga pada tingkat yang menguntungkan petani produsen padi merupakan suatu keharusan melalui

penetapan tarif impor dan kebijakan harga dasar gabah.

Penerapan kebijakan harga dasar perlu ditinjau secara periodik dengan mempertimbangkan harga pokok produksi padi dan meningkatkan nilai tukar beras pada tingkat keuntungan yang tinggi. Untuk lebih memperkuat posisi tawar petani, harus dibentuk Kelompok Koperasi Petani, yang tahun 2001 diharapkan terbentuk 5 Kelompok Koperasi Petani di setiap kecamatan dan pada tahun 2010 akan terbentuk 15 Kelompok Koperasi Petani yang berwawasan agribisnis di setiap kecamatan.

Sistem agribisnis di sini adalah kegiatan budidaya pertanian itu sendiri, termasuk industri perbenihan yang tangguh, industri pengolahannya (*agroindustry*) dan jasa-jasa pendukungnya. Nilai tambah terbesar suatu rangkaian industri pertanian tercipta pada subsistem pengolahan atau agroindustri. Di sini kegiatan agroindustri pedesaan dapat menjadi fase transisi menuju transformasi struktural pertanian ke industri yang sebenarnya.

Untuk memberi insentif guna menghasilkan produk-produk pertanian yang unggul, pengembangannya mutlak harus dilakukan secara terpadu dalam suatu kesatuan sistem agribisnis. Dengan pola pengembangan produksi pertanian dengan wawasan agribisnis ini, maka sektor pertanian akan dapat menjadi sektor yang bergengsi dan menjadi poros penggerak ekonomi.

Deskripsi Alternatif Kebijakan Peningkatan Minat Tenaga Muda Bekerja di Sektor Pertanian 2001 - 2010 dijelaskan sebagai berikut:

Tabel 4. Deskripsi Alternatif Kebijakan Peningkatan Minat Tenaga Muda Bekerja di Sektor Pertanian

URAIAN	STATUS QUO	SASARAN ALTERNATIF KEBIJAKAN PENINGKATAN MINAT TENAGA MUDA BEKERJA DI SEKTOR PERTANIAN		ASUMSI
		TH. 2001	TH.2010	
TUJUAN UMUM <i>Meningkatnya minat kerja tenaga muda bekerja di sektor pertanian dan berwawasan agibisnis</i>	Masih sedikit tenaga kerja muda bekerja di sektor pertanian	30 % tenaga kerja muda bekerja di sektor pertanian	50 % tenaga kerja muda bekerja di sektor pertanian	◆ Fasilitasi dari pemerintah dan swadaya
FOKUS KEBIJAKAN 1. <i>Tenaga muda dilatih dan dimagang kan baik di dalam dan luar negeri</i>	Tenaga muda petani terlatih masih sedikit	10 % tenaga muda petani terlatih	30 % tenaga muda petani terlatih	◆ Keterpaduan pola pengembangan agibisnis
2. <i>Harga komoditi padi diproteksi/ Nilai tukar beras ditingkatkan</i>	<i>Floor Price</i> Padi belum menguntungkan petani	<i>Floor Price</i> /Nilai tukar Padi menguntungkan petani	<i>Floor Price</i> Padi /Nilai tukar menguntungkan petani	
3. <i>Terbentuk Koperasi Petani yang kuat</i>	Belum ada	Terbentuk 5 Kelompok Koperasi Tani setiap kecamatan yang berwawasan agribisnis	Terbentuk 15 Kelompok Koperasi Tani setiap kecamatan, yang berwawasan agribisnis	◆ Dilakukan Analisis dinamika pasar yang intensif

Sumber : Analisis pengolahan data primer

4. Alternatif Kebijakan Intensifikasi Lahan Sempit Tahun 2001 - 2010

a. Tujuan Umum Kebijakan

Tujuan yang ingin dicapai dalam Alternatif Kebijakan Intensifikasi Lahan Sempit 2001 – 2010 ini adalah meningkatnya mutu intensifikasi di lahan sempit. Dengan adanya alternatif kebijakan ini, yang sebelumnya lahan sempit masih rendah intensifikasinya,

pada tahun 2001 akan terintensifikasi lahan sempit seluas 25.000 hektar dan seluas 50.000 hektar di tahun 2010.

b. Fokus Kebijakan

Sedangkan untuk merealisasikan alternatif kebijakan tersebut, konsolidasi lahan sempit dan petak-petak percobaan harus dilaksanakan. Tahun 2001, diharapkan 20% lahan sempit sudah dikonsolidasikan dan

pada tahun 2010 sebanyak 50% lahan sempit dilakukan konsolidasi dengan pola *corporate farming*. Kegiatan *corporate farming* ini menggunakan pendekatan usahatani kelompok. Satu atau lebih kelompok tani menyerahkan operasional pengelolaan usahatannya kepada seorang profesional yang disebut manajer. Manajer dipilih oleh anggota kelompok tani secara demokratis. Secara ideal, *corporate farming* ini tidak dibatasi pada usahatani saja (*on-farm*), tetapi dapat pula mengembangkan usaha-usaha *off-farm* yaitu industri pengolahan primer, pemasaran hasil, pengembangan usaha pelayanan jasa alat mesin pertanian dan lain-lain. Sehingga pada kegiatan ini sangat diperlukan bantuan dana yang besar untuk penguatan modal abadi kelompok.

Untuk lebih memperjelas Alternatif Kebijakan Intensifikasi Lahan Sempit ini, lihat deskripsi berikut:

HASIL ANALISIS

Setelah dilakukan analisis terhadap dampak positif dan berbagai konsekuensi yang ditimbulkan dari masing-masing alternatif kebijakan, maka akan dapat dijelaskan hal-hal sebagai berikut :

1. Alternatif Kebijakan Peningkatan Produktivitas Hasil Tahun 2001 - 2010

Kebijakan ini bertujuan untuk meningkatkan produksi dan produktivitas padi yang pada tahun terakhir menunjukkan kecenderungan mengalami penurunan hasil. Sedangkan langkah-langkah yang paling tepat untuk dilaksanakan dalam rangka mendukung kebijakan ini adalah :

- Pemanfaatan Teknologi Terapan Spesifik Lokasi
- Efisiensi Penggunaan Pupuk An-Organik (Kimia)
- Penghematan Penggunaan Pestisida Kimiawi
- Penyuluhan Secara Partisipatoris

Tabel 5. Deskripsi Alternatif Kebijakan Intensifikasi Lahan Sempit

URAIAN	STATUS QUO	SASARAN		ASUMSI
		ALTERNATIF KEBIJAKAN INTENSIFIKASI LAHAN SEMPIIT		
		TB 2001	TB 2010	
TUJUAN UMUM <i>Peningkatan intensifikasi di lahan yang sempit</i>	Lahan sempit belum intensif	25.000 hektar lahan sempit telah diintensifkan	50.000 hektar lahan sempit telah diintensifkan	♦ Iklim mendukung
FOKUS KEBIJAKAN <i>Dilakukan program konsolidasi tanah dan dilakukan demonstrasi percontohan</i>	Belum ada konsolidasi	20 % lahan sempit sudah terkonsolidasi (<i>corporate farming</i>)	50 % lahan sempit sudah terkonsolidasi (<i>corporate farming</i>)	♦ Tidak ada gejolak sosial

Sumber : Analisa pengolahan data primer

Berdasarkan hasil analisis, alternatif kebijakan ini selanjutnya dapat diinterpretasikan sebagai berikut :

- a. Kebijakan tersebut menimbulkan dampak positif yang cukup besar di dalam hal :
 - 1). Penghematan subsidi pupuk anorganik dan pestisida
 - 2). Memperkecil dampak kerusakan lingkungan dan lahan pertanian
 - 3). Mengurangi residu pestisida pada beras yang dihasilkan
 - 4). Penggunaan teknologi lokal spesifik
 - 5). Kehilangan paska panen dapat ditekan
 - 6). Keterlibatan petani dalam proses pembuatan kebijakan
- b. Konsekuensi biaya yang dikeluarkan oleh pemerintah relatif kecil, karena kebijakan ini hanya memerlukan sosialisasi hasil-hasil penelitian yang telah ada dan pemerintah hanya bertindak sebagai motivator dan fasilitator
- c. Probabilitas keberhasilan kebijakan ini sangat besar, walaupun tersedia dana yang relatif kecil

2. *Alternatif Kebijakan Pengendalian Penyusutan Lahan Tahun 2001-2010*

Penyusutan lahan di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta setiap tahunnya adalah sebesar 263,88 hektar. Alternatif kebijakan ini dilaksanakan untuk mengendalikan penyusutan lahan. Langkah kebijakan yang akan ditempuh adalah dengan menyusun Undang-undang Tata Guna Lahan.

Berdasarkan hasil analisis, alternatif kebijakan ini selanjutnya dapat diinterpretasikan sebagai berikut :

- a. Dampak positif yang ditimbulkan adalah menghambat laju penyusutan lahan sawah

- b. Konsekuensi yang ditimbulkan oleh kebijakan ini cukup besar, karena :
 - 1). Pengendalian penyusutan lahan dan lajunya proses pembangunan di sektor industri, perumahan dan lainnya, adalah sesuatu yang dilematis. Hal ini disebabkan karena tanah merupakan faktor produksi yang paling strategis di dalam kegiatan usahatani di satu sisi dan lahan sebagai sarana pembangunan di sisi lain, sebagai dampak pertambahan penduduk. Sebab dengan semakin meningkatnya jumlah penduduk, semakin bertambah keperluan manusia akan tempat pemukiman (perumahan), kesempatan kerja (pembangunan industri), perkantoran dan sarana perdagangan), sarana kesejahteraan sosial (pendidikan, kesehatan, olah raga, tempat ibadah), serta sarana transportasi (jalan raya)
 - 2). Penyusutan lahan pertanian juga disebabkan perubahan komoditas padi ke non padi. Hal ini terlihat dengan perluasan areal tambah tanam untuk komoditas lombok, salak, bawang merah, kacang tanah dan kedelai
- c. Probabilitas kegagalan kebijakan ini sangat besar

3. *Alternatif Kebijakan Peningkatan Minat Tenaga Muda Bekerja Di Sektor Pertanian Tahun 2001-2010*

Alternatif kebijakan ini bertujuan untuk meningkatkan minat tenaga muda bekerja di sektor pertanian. Sedangkan langkah-langkah yang perlu dilakukan adalah :

- a. Pelatihan tenaga muda di bidang pertanian yang berwawasan

- agribisnis, baik di luar maupun di dalam negeri.
- b. Penetapan harga gabah yang menguntungkan petani.
- c. Membentuk koperasi petani yang mandiri dan profesional.

Berdasarkan hasil analisis, alternatif kebijakan ini selanjutnya dapat diinterpretasikan sebagai berikut :

1. Dampak positif yang ditimbulkan bila kebijakan ini dilaksanakan, adalah :
 - a. Dengan pola pengembangan pertanian yang berwawasan agribisnis, maka sektor pertanian akan dapat menjadi sektor yang bergengsi, karena nilai tukar beras dan tingkat harga yang membaik sehingga banyak tenaga muda yang terjun ke bidang pertanian
 - b. Terbentuknya kelompok tani yang mandiri dan profesional dalam mengakses permodalan. Di samping itu dengan koperasi petani yang profesional akan mempunyai "*bargaining position*" yang kuat
2. Konsekuensi yang ditimbulkan bila kebijakan ini dilaksanakan, adalah :
 - a. Diperlukan dana yang besar untuk menciptakan pertanian yang berwawasan agribisnis, karena diperlukan untuk meningkatkan pengetahuan dan ketrampilan SDM, sarana dan prasarana
 - b. Probabilitas keberhasilan cukup besar, namun harus tersedia dana yang cukup besar pula

4. Alternatif Kebijakan Intensifikasi Lahan Sempit Tahun 2001-2010

Hasil identifikasi di lapangan menunjukkan bahwa kepemilikan lahan pertanian di Provinsi Daerah

Istimewa Yogyakarta dari tahun ke tahun ada kecenderungan semakin menyempit. Untuk mengatasi hal tersebut dibuat alternatif kebijakan yang bertujuan meningkatkan intensifikasi lahan sempit. Sedangkan langkah-langkah yang perlu diambil adalah melakukan program konsolidasi lahan atau *corporate farming*.

Berdasarkan hasil analisis, alternatif kebijakan ini selanjutnya dapat diinterpretasikan sebagai berikut:

- a. Dampak positifnya bila lahan sempit dikonsolidasikan dalam bentuk *corporate farming*, maka akan tercipta keberdayaan, kesejahteraan dan memantapkan ketahanan pangan. Hal ini terjadi karena dalam kebijakan ini disalurkan dana yang besar untuk Modal Abadi Kelompok. Sehingga dengan adanya pengelolaan yang profesional *corporate farming*, akan meningkatkan produktivitas usahatani
- b. Sedangkan konsekuensi yang ditimbulkan bila kebijakan ini dilaksanakan :
 - 1). Diperlukan dana yang sangat besar
 - 2). Masih diperlukan adanya intervensi pemerintah, karena rumitnya pengaturan bidang-bidang tanah yang dikelola sebagai usahatani bersama
- c. Probabilitas keberhasilan sebenarnya cukup besar, namun diperlukan dana yang amat besar pula

Dari uraian hasil analisis dampak positif dan konsekuensi dari 4 (empat) alternatif kebijakan tersebut, dapat dituangkan dalam bentuk tabel identifikasi alternatif kebijakan dalam upaya peningkatan produksi padi di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.

Tabel 6. Identifikasi Alternatif Kebijakan Dalam Upaya Peningkatan Produksi Padi di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2001-2010

Alternatif Kebijakan	Variabel Kebijakan			
	Dampak Positif	Dana/Biaya	Probabilitas Keberhasilan	Tingkat Kesulitan
1. Alternatif Kebijakan Peningkatan Produktivitas Hasil Th.2001-2010	Besar	Kecil	Besar	Rendah
2. Alternatif Kebijakan Pengendalian Penyusutan Lahan Th.2001-2010	Sedang	Cukup Besar	Kecil	Tinggi
3. Alternatif Kebijakan Peningkatan Minat Tenaga Muda Bekerja Di Sektor Pertanian Th.2001-2010	Besar	Besar	Cukup Besar	Sedang
4. Alternatif Kebijakan Intensifikasi Lahan Sempit Th.2001-2010	Besar	Besar	Sedang	Tinggi

Sumber : Analisis pengolahan data sekunder dan Diadopsi dari Metode May (Feasible Manipulations), Effendi,2000

Berdasarkan tabel tersebut di atas, alternatif kebijakan yang paling baik dan efektif untuk dilaksanakan adalah **Alternatif Kebijakan Peningkatan Produktivitas Tahun 2001-2010**, dengan berbagai pertimbangan sebagai berikut :

- Segi probabilitas keberhasilan yang besar serta dampak positif yang ditimbulkan
- Biaya yang diperlukan untuk melaksanakan program ini relatif kecil dan tidak sulit untuk dilaksanakan
- Pemerintah akan dapat menghemat subsidi untuk pupuk an-organik dan pestisida

- Petani dapat menghemat biaya produksi usahatani
- Kebijakan ini merupakan jawaban terhadap permbangunan pertanian yang berwawasan lingkungan

Sedangkan langkah kedua untuk merekomendasikan salah satu alternatif kebijakan diperlukan penilaian berdasarkan beberapa kriteria dengan menggunakan *Bardach's Typology*, kemudian dilakukan skoring untuk mencari nilai bobot tertinggi.

Hasil penilaian terhadap masing-masing alternatif kebijakan tersebut, dapat dibuat tabel rekapitulasi skor sebagai berikut :

Tabel 7. Rekapitulasi Skor Alternatif Kebijakan

Alternatif Kebijakan	Kategori Skor					
	Teknis	Ekonomi	Hukum	Sosial	Administrasi	Politik
1. Alternatif Kebijakan Peningkatan Produktivitas Hasil Th.2001-2010	4	4	4	4	3	3
2. Alternatif Kebijakan Pengendalian Penyusutan Lahan Th.2001-2010	2	2	2	2	2	3
3. Alternatif Kebijakan Peningkatan Minat Tenaga Muda Bekerja Di Sektor Pertanian Th.2001-2010	3	2	4	3	2	2
4. Alternatif Kebijakan Intensifikasi Lahan Sempit Th.2001-2010	2	2	3	2	2	4

Keterangan :

- a. Nilai Skor 1 = tidak dapat diterapkan
 b. Nilai Skor 2 = kurang efektif
 c. Nilai Skor 3 = cukup efektif
 d. Nilai Skor 4 = sangat efektif

Sumber : Analisis pengolahan data sekunder

Berdasarkan perhitungan tersebut, dapat dihasilkan ranking alternatif kebijakan sebagaimana dijelaskan sebagai berikut :

- a. **Ranking I** adalah **Alternatif Kebijakan Peningkatan Produktivitas Hasil**, memperoleh jumlah nilai skor 22 atau mempunyai nilai bobot $22 : 6 = 3,7$ (mendekati Skor 4), berarti sangat efektif untuk dilaksanakan
- b. **Ranking II** adalah **Alternatif Kebijakan Peningkatan Minat**

Tenaga Muda Bekerja Di Sektor Pertanian, memperoleh jumlah nilai skor 15 atau mempunyai nilai bobot $15 : 6 = 2,7$ (mendekati Skor 3), berarti cukup efektif untuk dilaksanakan

- c. **Ranking III** adalah **Alternatif Kebijakan Intensifikasi Lahan Sempit**, memperoleh jumlah nilai skor 15 atau mempunyai nilai bobot $15 : 6 = 2,5$ (mendekati 3), berarti cukup efektif untuk dilaksanakan

d. **Ranking IV** adalah **Alternatif Kebijakan Pengendalian Penyusutan Lahan**, memperoleh jumlah nilai skor 13 atau mempunyai nilai bobot $13 : 6 = 2,2$ (mendekati 2), berarti tidak efektif untuk dilaksanakan

Dari hasil perhitungan berdasarkan berbagai kriteria serta berdasarkan analisis dampak positif dan konsekuensi, maka kebijakan yang direkomendasikan untuk peningkatan produksi padi di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta adalah :

KEBIJAKAN PENINGKATAN PRODUKTIVITAS DAN PENANGANAN PASKA PANEN TAHUN 2001-2010.

PENUTUP

Analisis alternatif kebijakan ini diharapkan dapat dijadikan salah satu bagian dari proses reformasi pembuatan kebijakan peningkatan produksi padi di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta yang mengedepankan peningkatan efisiensi, transparansi, demokratisasi dan partisipasi petani dalam pembangunan pertanian. Berkaitan dengan itu, hendaknya pendekatan partisipatif merupakan wacana yang efektif dalam mewujudkan demokratisasi pelaksanaan pembangunan pertanian, baik di bidang perencanaan, penyuluhan, pelayanan teknis, rekayasa teknologi dalam rangka pemberdayaan petani.

Inti pendekatan partisipatif ini adalah kemandirian petani dalam proses perencanaan, pemecahan masalah sampai dengan proses pembuatan suatu kebijakan. Di samping itu keterlibatan petani

dimaksudkan sebagai bentuk partisipasi dalam pengambilan keputusan, partisipasi dalam pelaksanaan program-program pembangunan serta partisipasi dalam pemantauan dan evaluasi program.

Menanggapi tuntutan perubahan-perubahan di masyarakat, hendaknya di dalam proses pembuatan kebijakan pembangunan pertanian tanaman pangan (padi, palawija dan hortikultura) diperlukan penyesuaian kebijakan dan program di masa yang akan datang, agar lebih efektif dan efisien dalam mewujudkan sasaran teknis di bidang peningkatan produksi dan pendapatan serta kesejahteraan petani.

Diharapkan pula, hasil penelitian ini dapat dijadikan bahan perbandingan atau bahan pertimbangan untuk mempertajam penelitian selanjutnya. Karena di dalam pelaksanaan pembangunan pertanian tanaman pangan, padi hanyalah salah satu komoditas saja. Masih banyak komoditas lain yang memerlukan perhatian untuk ditingkatkan produksinya, di antaranya adalah jagung, kedelai dan tanaman hortikultura.

DAFTAR PUSTAKA

- Bardach, Eugene. 1980. *On Designing Implementable Programs: In Pitfalls of Analysis*, ed, Giandomenico Majone and Edward S. Quade, Chichester: John Wiley and Sons.
- Effendi, Sofian, 1990, *Kebijakan, Pengembangan Sumber Daya Manusia Dalam Menghadapi Era Tinggal Landas*, MAP-UGM, Yogyakarta, Mimeo.

-----, 2000 *Analisis dan Implementation kebijakan Publik*, MAP-UGM, Yogyakarta, Mimeo.

Guritno, Bambang, 1999, *Manajemen Produksi Tanaman Pangan dan Hortikultura Menuju Ketahanan pangan dan Agribisnis Tangguh*, Makalah Diskusi Pakar Arah Pembangunan Tanaman pangan dan Hortikultura, 10 Maret 1999, Yogyakarta, Mimeo

Dunn, W.N, 1999, *Pengantar Analisis Kebijakan Publik*, Penerjemah : Samodra Wibawa, Diah Asitadani, Agus Heruanto Hadna, Erwan Agus Purwanto, Penyunting : Muhadjir Darwin, Edisi kedua, Gadjah Mada University Press.